



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Pengaruh *Comfort Women Deal* 2015 Terhadap Sentimen
Anti-Jepang di Korea Selatan**

Skripsi

Oleh

Cheryl Angelike Christina Lay

2013330187

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Pengaruh *Comfort Women Deal* 2015 Terhadap Sentimen
Anti-Jepang di Korea Selatan**

Skripsi

Oleh

Cheryl Angelike Christina Lay

2013330187

Pembimbing

Albert Triwibowo, S.IP.,M.A.

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Cheryl Angelike Christina Lay
Nomor Pokok : 2013330187
Judul : Pengaruh *Comfort Women Deal* 2015 terhadap Sentimen Anti-Jepang di
Korea Selatan

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 11 Januari 2018
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Sylvia Yazid, MPPM., Ph.D.

: 

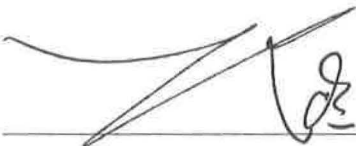
Sekretaris

Albert Triwibowo, S.IP., M.A.

: 

Anggota

Dr. Paulus Yohanes Nur Indro

: 

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Cheryl Angelike Christina Lay
NPM : 2013330187
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Pengaruh *Comfort Women Deal* 2015 terhadap
Sentimen Anti-Jepang di Korea Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 3 Januari 2018



Cheryl Angelike Christina Lay

ABSTRAK

Nama : Cheryl Angelike Christina Lay
NPM : 2013330187
Judul : Pengaruh *Comfort Women Deal 2015* Terhadap Sentimen Anti-Jepang di Korea Selatan

Sentimen anti-Jepang di Korea Selatan merupakan kebencian terhadap Jepang yang terbentuk sejak masa kolonial Jepang. Kekejaman Jepang pada masa pendudukannya di Korea Selatan menyisakan kenangan buruk yang mempengaruhi opini publik terhadap Jepang hingga saat ini. Upaya Jepang untuk mengatasi sentimen tersebut adalah dengan melakukan rekonsiliasi berupa permintaan maaf dan kompensasi kepada pihak yang pernah dirugikan, dalam kasus ini adalah para *comfort women*.

Penelitian ini membahas sentimen anti-Jepang, upaya Jepang untuk mengatasi sentimen tersebut, dan apa pengaruh *Comfort Women Deal 2015* terhadap sentimen tersebut. Sentimen anti-Jepang dijelaskan menggunakan konsep kenangan (*remembrance*), sedangkan upaya Jepang untuk mengatasinya dijelaskan menggunakan konsep rekonsiliasi dan model Adenauer. Pertanyaan penelitian yang diangkat adalah “Apa pengaruh persetujuan *Comfort Woman Deal* Jepang – Korea Selatan tahun 2015 terhadap sentimen anti-Jepang di Korea Selatan?”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian kualitatif-deskriptif untuk melakukan analisis guna menjawab pertanyaan riset.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa upaya rekonsiliasi Jepang terhadap Korea Selatan terkait isu *comfort women* yang dilakukan melalui disepakatinya perjanjian *Comfort Women Deal* berhasil mengurangi sentimen anti-Jepang yang ada serta membuka awal hubungan baik antara kedua negara tersebut. Dan jawaban dari pertanyaan penelitian ini adalah perjanjian *Comfort Women Deal* tahun 2015 berpengaruh positif terhadap hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan, meskipun sentimen anti-Jepang tidak sepenuhnya hilang tetapi dapat dikurangi dengan upaya permintaan maaf dan kompensasi yang telah dilakukan Jepang.

Kata kunci: Sentimen Anti-Jepang, Jepang, Korea Selatan, Wanita Penghibur, Rekonsiliasi, Kenangan.

ABSTRACT

Name : Cheryl Angelike Christina Lay

Student ID : 2013330187

Title : The Effect of 2015 Comfort Women Deal on Anti-Japanese Sentiment in South Korea

Anti-Japanese sentiment in South Korea is a hatred of Japan that has been formed since the Japanese colonial period. The Japanese atrocities during its occupation of South Korea left behind bad memories that affecting the public opinion towards Japan to this day. Japan's reconciliation attempts to overcome such sentiments were apologies and compensation to those who have been harmed, in this case the comfort women.

This study discusses anti-Japanese sentiment, Japan's attempt to overcome such sentiments, and what is the effect of 2015 Comfort Women Deal has on such sentiments. Anti-Japanese sentiment explained by using the concept of remembrance, while Japanese attempts to overcome the sentiment explained by using the concept of reconciliation and the Adenauer model. The research question raised is "What is the effect of the 2015 Japan-South Korea Comfort Woman Deal agreement on anti-Japanese sentiment in South Korea?". The method used in this research is qualitative research method to conduct analysis and also to answer the research question.

From this study it was concluded that Japan's reconciliation efforts towards South Korea on comfort women issues that achieved through the Comfort Women Deal managed to reduce the anti-Japanese sentiment and opened a beginning of good relations between the two countries. And the answer to this research question is that the 2015 Comfort Women Deal has a good impact for bilateral relations between Japan and South Korea, although the anti-Japanese sentiment did not completely disappear but it is successfully reduced by the efforts of national apology and compensation that has been done by Japan.

Keywords: Anti-Japanese Sentiment, Japan, South Korea, Comfort Women, Reconciliation, Remembrance.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat perlindungan dan berkat-NYA penulis mampu menyelesaikan penelitian yang berjudul “Pengaruh Upaya Diplomasi Jepang Terhadap Sentimen Anti-Jepang di Korea Selatan”. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bpk. Albert Triwibowo, S.IP.,M.A. selaku dosen pembimbing atas perhatian, waktu, ilmu, pengajaran dan kesabaran yang sudah diberikan kepada penulis, selama proses penelitian ini. Penelitian ini ditulis untuk diajukan sebagai tahapan akhir untuk meraih gelar sarjana dalam studi Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Penulis menyadari dalam penulisan dan penelitian ini masih didapati banyak kekurangan dan menanggapi hal tersebut, penulis sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran dari berbagai pihak guna menyempurnakan penelitian ini kedepannya. Penulis juga berharap, penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan dan mampu membantu pembelajaran mengenai kasus serupa kepada para pembacanya. Terima kasih, salam sejahtera dan Tuhan memberkati.

Bandung, 3 Januari 2018

Penulis

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama dan selalu, terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya selama ini. Terimakasih kepada Mama, Papa, Mas Ronny, Mba Ina, Mas Recky, keponakan-keponakan tercinta, dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terimakasih untuk Mas Albert yang telah membimbing sampai skripsi ini selesai. Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan di Universitas Katolik Parahyangan, terutama 미친 변태s : Zellina Mulyana, Maria Brigita Kiani Kambey, Maria Cornelia Kalesaran yang selama kuliah menemani disaat kuliah dan disaat gabut. Terimakasih kepada teman SMP yang sampai sekarang nggak bosan-bosan ngomongin hal-hal seputar K-Pop, Vilena Nadianty, jangan bosan-bosan nonton konser sama aku! Special thanks to teteh-tetekku yang jauh di negeri ginseng, 소녀시대 언니들 yang selama delapan tahun terakhir menemani meskipun hanya lewat lagu-lagu dan meskipun hanya bertemu disaat konser. Special thanks juga untuk Kak Tiffany Hwang yang telah memberikan inspirasi sehingga terpilih topik penelitian ini. Last but not least my two precious ones, Leia and Luna, yang setiap hari menemani, menyambut aku pulang kuliah no matter how late it is, dan yang selalu jagain rumah. Terimakasih juga kepada orang-orang yang secara langsung atau pun tidak langsung yang telah berpengaruh dalam kehidupanku sampai saat ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Perumusan Masalah.....	7
1.4 Pembatasan Masalah.....	7
1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.5.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.5.2 Kegunaan Penelitian.....	8
1.6 Studi Literatur.....	9
1.7 Kerangka Pemikiran.....	14
1.8 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	19
1.8.1 Metode Penelitian.....	19
1.8.2 Teknik Pengumpulan Data.....	19
1.9 Sistematika Penulisan.....	20
BAB II SENTIMEN ANTI-JEPANG & DIPLOMASI JEPANG TERHADAP SENTIMEN ANTI-JEPANG	21
2.1 Ingatan Tentang Jepang.....	23

2.1.1	Korea Selatan	24
2.1.2	Tiongkok	25
2.1.3	Indonesia	25
2.2	Sentimen Anti-Jepang di Asia	26
2.3	Upaya Jepang Mengatasi Sentimen Anti-Jepang	29
BAB III HUBUNGAN BILATERAL JEPANG – KOREA SELATAN		32
3.1	Kolonialisme Jepang di Korea	35
3.2	Hubungan Jepang - Korea Selatan Pasca Perang Dunia	40
3.2.1	Ekonomi	42
3.2.2	Politik dan Keamanan	42
3.3	Hubungan Jepang-Korea Selatan Masa Park Geun-Hye	44
3.4	Sentimen anti-Jepang di Korea Selatan	45
3.4.1	Persetujuan <i>Comfort Women Deal</i> tahun 2015	50
BAB IV PENGARUH <i>COMFORT WOMEN DEAL 2015</i> TERHADAP HUBUNGAN JEPANG-KOREA SELATAN		52
4.1	Sentimen Anti-Jepang di Korea Selatan Sebelum <i>Comfort Women Deal 2015</i>	53
4.2	Sentimen Anti-Jepang Di Korea Selatan Setelah <i>Comfort Women Deal 2015</i>	56
4.3	Pengaruh Terhadap Hubungan Bilateral Jepang-Korea Selatan.....	61
BAB V KESIMPULAN.....		66
DAFTAR PUSTAKA.....		72

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Grafik <i>Leader Favorability</i> menurut masyarakat Korea Selatan terhadap beberapa pemimpin negara	48
Grafik 4.1 Grafik tingkat <i>Country Favorability</i> menurut masyarakat Korea Selatan terhadap beberapa negara.....	59
Grafik 4.2 Diagram perubahan tingkat kooperasi dan kompetisi Korea Selatan dengan Jepang	62
Grafik 4.3 Diagram opini masyarakat terhadap persepsi hubungan antara Korea Selatan dengan beberapa negara.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Perjanjian *Comfort Women Deal* 2015 63

DAFTAR SINGKATAN

DMZ	: <i>De-Militarized Zone</i>
ICJ	: <i>International Court of Justice</i>
MNC	: <i>Multinational Cooperation</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
OI	: Organisasi Internasional
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Diplomasi dalam hubungan internasional pada dasarnya adalah interaksi atau hubungan antara dua atau lebih aktor yang bernegosiasi untuk mencapai kepentingan nasionalnya.¹ Aktor yang berinteraksi tidak hanya negara atau pun representatif negara, tetapi diplomasi juga melibatkan aktor-aktor seperti perusahaan multinasional (MNC); organisasi internasional; dan aktor internasional lainnya. Seiring perkembangan zaman isu-isu yang dihadapi di dalam dunia internasional pun semakin dinamis dan kompleks, aktor yang terlibat pun tidak hanya negara, serta cakupan hubungan diplomatik semakin terbuka lebar mulai dari regional hingga global, ditambah lagi adanya globalisasi yang membuat jarak tidak lagi menjadi penghalang bagi aktor-aktor tersebut untuk berinteraksi. Semua aktor yang terlibat dalam dunia diplomasi harus menyesuaikan tujuan dengan tindakannya, sehingga apa yang menjadi kepentingannya bisa didapat melalui cara damai (*peaceful means*).²

Hubungan diplomasi antara Jepang dan Korea Selatan terbentuk sejak tahun 1965, dimana kedua negara tersebut menandatangani *Treaty on Basic*

¹ Andrew F. Cooper, Jorge Heine, dan Ramesh Thakur, "Introduction: The Challenges of 21st-Century Diplomacy ", *Oxford Handbooks Online* (2013): hal.3, <https://doi:10.1093/oxfordhb/9780199588862.013.0001>.

² Ibid, hal.2.

Relations between Japan and the Republic of Korea sebagai tanda dimulainya awal hubungan baru pascakolonialisme Jepang di Korea Selatan. Perjanjian tersebut menjembatani hubungan dasar antara kedua negara dan membuka jalan bagi kerjasama antara Jepang dan Korea di masa yang akan datang. Dalam perjanjian ini juga dimuat hal-hal seperti pembatalan perjanjian penggabungan (*annexation treaty*) tahun 1910, penyelesaian kompensasi atas kerugian yang diakibatkan pada masa penjajahan, dan penormalan hubungan antara Jepang dan Korea. Akan tetapi menurut Osamu Ota, seorang professor dari Universitas Doshisha Kyoto, perjanjian tersebut gagal mengungkap kerugian yang dialami Korea saat masa kolonial Jepang, sehingga cenderung berfokus pada kompensasi finansial daripada pengakuan dan penyesalan sepenuhnya dari perbuatan Jepang.³

Hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan yang renggang disebabkan oleh masih adanya sejumlah isu mengenai kerugian pascakolonialisme Jepang yang belum terselesaikan. Masih ada kebencian terhadap Jepang yang dianggap gagal untuk meminta maaf dan kurangnya kompensasi atas kerugian pasca masa kolonialnya selama 35 tahun di Korea. Jepang berargumen bahwa semua yang terjadi pada masa kolonialismenya adalah sejarah yang sudah lewat dan tidak perlu diungkit kembali. Adanya desakan dari Korea Selatan yang menuntut kompensasi dari Jepang terhadap korban-korban penjajahan Jepang menyebabkan Komisi Hak Asasi Manusia PBB menawarkan solusi kepada Jepang untuk menerima tanggung jawab hukum dan melunasi segala bentuk kompensasi

³ Chung Min-Uck, "1965 Treaty Didn't Settle All Issues", *The Korea Times*, diakses dari http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2014/03/113_113435.html pada 5 Agustus 2017.

kepada para korban perbudakan seksual militer Jepang atau yang dikenal sebagai wanita penghibur (*comfort woman*).⁴

Upaya permintaan maaf, kompensasi, dan ganti rugi bukan pertama kalinya dilakukan oleh suatu negara, hal ini juga pernah dilakukan beberapa negara untuk memperbaiki hubungan dengan negara yang pernah dirugikan akibat pelanggaran yang dilakukannya. Beberapa contohnya antara lain Jerman yang berulang kali meminta maaf atas kejahatan perang *Nazi*, Amerika Serikat yang meminta maaf atas pengasingan orang-orang Jepang pada saat Perang Dunia II, dan Ratu Elizabeth yang menandatangani pernyataan permintaan maaf atas pengambilalihan pulau Maori di New Zealand pada tahun 1995.⁵ Permintaan maaf berupa pernyataan penyesalan atas pelanggaran yang telah dilakukan biasanya disertai dengan kompensasi berupa ganti rugi finansial, dan penandatanganan perjanjian perdamaian dengan negara yang dirugikan. Permintaan maaf bersifat merendahkan diri, mengakui sepenuhnya kesalahan yang dilakukan, dan tidak berusaha menyangkal atau mengurangi tanggung jawab yang dilakukan sebagai upaya rekonsiliasi dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan yang renggang akibat konflik di masa lalu.⁶ Hal-hal tersebut dianggap belum sepenuhnya dilakukan oleh Jepang, sehingga sentimen anti-Jepang masih ada meski pun Jepang telah beberapa kali menyatakan permintaan maafnya sebagai bentuk upaya rekonsiliasi.

⁴ Sue R.Lee, "Comforting the Comfort Women: Who Can Make Japan Pay", *Journal of International Law*, 24 (2003) : hal.525.

⁵ Jane Yamazaki, *Japanese Apologies for World War II* (London: Routledge, 2013), hal.2.

⁶ *Ibid*, hal.3

Rekonsiliasi dilakukan untuk menjaga stabilitas dan kedamaian hubungan antar negara yang pernah berkonflik, tidak hanya peran pemerintah peran dari masyarakat juga penting untuk keberhasilan sebuah upaya rekonsiliasi. Pemerintah berperan dalam menanamkan pentingnya upaya rekonsiliasi serta mengedukasi masyarakatnya tentang sejarah tanpa ada yang ditutup-tutupi. Peran masyarakat dalam hal ini adalah untuk memposisikan identitasnya sebagai manusia dengan manusia, dan harus melepas identitasnya sebagai korban (*victim*) atau penyerang (*aggressor*) sehingga upaya rekonsiliasi dapat berhasil.⁷ Menurut upaya rekonsiliasi pasca Perang Dunia II antara Jerman, Prancis, dan Polandia, yang diperlukan Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok untuk mencapai keberhasilan dalam upaya rekonsiliasinya adalah dialog yang bersifat transparan. Dialog yang bersifat transparan dalam upaya rekonsiliasi diperlukan untuk mengembalikan dan atau membangun kepercayaan (*trust*), sehingga Jepang dalam kasus ini dapat merubah persepsi negatif Korea Selatan terhadap Jepang.

⁷ “Post-WWII Reconciliation and Cooperation: Lessons for East Asia”, *The Asan Institute for Policy Studies*, diakses dari <http://en.asaninst.org/contents/post-wwii-reconciliation-and-cooperation-lessons-for-east-asia/> pada 5 Agustus 2017.

1.2 Identifikasi Masalah

Pasca masa kolonial Jepang di beberapa negara di Asia, hubungan antara negara-negara bekas jajahan Jepang tidak semuanya baik. Kekejaman yang dilakukan Jepang terhadap negara-negara jajahannya menyisakan dendam dan kebencian yang berpengaruh terhadap hubungan antara Jepang dan negara bekas jajahannya. Korea dan Tiongkok memiliki sentimen anti-Jepang tertinggi dibandingkan negara bekas jajahan Jepang lainnya. Adanya sentimen tersebut diatasi Jepang dengan upaya rekonsiliasi berupa pernyataan maaf dari beberapa pemimpin Jepang secara berulang kali dan kompensasi finansial kepada negara bekas jajahannya.

Perbedaan pandangan sejarah terbentuk dari latar belakang historis yang akan dianalisis menggunakan konsep ingatan (*remembrance*), dimana sentimen anti-Jepang merupakan hasil dari ingatan masa lalu yang kelam sehingga meninggalkan kepahitan dan kebencian. Ketegangan antara Jepang dan Korea mencapai puncaknya pada tahun 2013 ketika Presiden Korea Selatan Park Geun-Hye menolak segala bentuk pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Tiongkok sebagai penerima keuntungan utama dari ketegangan tersebut dengan sengaja memperparah ketegangan antara Jepang dan Korea Selatan dengan membangun sebuah monumen peringatan untuk Ahn Jung-Geun di Harbin pada tahun 2014 atas permintaan Park Geun-Hye.⁸

⁸ Robert E. Kelly, "Three Hypotheses on Korea's Intense Resentment of Japan", *The Diplomat*, <http://thediplomat.com/2014/03/three-hypotheses-on-koreas-intense-resentment-of-japan/>, diakses pada 11 Agustus 2017.

Ahn Jung-Geun membunuh Hirobumi Ito yang merupakan seorang Perdana Menteri Jepang dan Gubernur Jenderal yang menduduki Korea pada masa pendudukannya di tahun 1909. Tugu peringatan tersebut dibangun di lokasi penembakan Hirobumi Ito, yang terletak di Tiongkok. Ahn Jung-Geun dikecam sebagai "penjahat perang" oleh Jepang dan dikenang sebagai "pejuang kemerdekaan" oleh Korea Selatan.⁹ Terlihat adanya perbedaan pandangan terhadap tokoh Ahn Jung-Geun dari prespektif Jepang dan Korea Selatan yang memunculkan selisih paham antara kedua negara.

Pemicu memanasnya hubungan antara Jepang dan Korea juga dipicu oleh kunjungan Perdana Menteri Shinzo Abe ke Kuil Yasukuni yang terkenal kontroversial karena sejarahnya. Ditambah lagi Korea Selatan dan Tiongkok yang melayangkan kritik dan protes terhadap konten dari buku teks sejarah milik Jepang yang tidak memuat kekejaman Jepang pada masa penjajahannya di Asia. Jepang dituntut untuk segera merubah konten dari buku teks sejarahnya dan mengakui semua kekejaman yang dilakukannya dengan tidak menutupinya (*whitewashing*) dengan hanya menceritakan sebagian dari sejarah yang pernah terjadi pada masa kolonialnya. Sebelum adanya itikad baik dari pihak Jepang, Park Geun-Hye sebagai Presiden Korea Selatan pada saat itu, menolak segala jenis kunjungan dan pertemuan diplomatiknya dengan Shinzo Abe.

Kunjungan PM Shinzo Abe ke kuil Yasukuni, permasalahan buku teks sejarah Jepang, sengketa pulau Dokdo/Takeshima, serta isu *comfort women* memperburuk sentimen anti-Jepang di Korea Selatan. Masyarakat Korea Selatan

⁹ Angela E. Kubo, "China Opens Memorial Honoring Korean Independence Activist", *The Diplomat*, diakses dari <https://thediplomat.com/2014/01/china-opens-memorial-honoring-korean-independence-activist/> pada 21 Agustus 2017.

mengancam hal-hal yang dilakukan Jepang tersebut dan menganggap permintaan maaf yang pernah diberikan Jepang tidak sungguh-sungguh. Melihat sentimen anti-Jepang yang masih tinggi di masyarakat Korea Selatan, Presiden Park Geun-Hye memutuskan untuk menolak pertemuannya dengan PM Shinzo Abe sebelum diselesaikannya isu *comfort women*. Hal tersebut mengawali terjadinya kesepakatan *Comfort Women Deal* yang akhirnya disepakati pada tahun 2015, perjanjian ini merupakan langkah awal Jepang untuk mengatasi sentimen anti-Jepang di Korea Selatan yang kembali mengangkat isu perbudakan seks pada masa kolonialismenya. Dalam penelitian ini akan dilihat apa pengaruh yang ditimbulkan dari disepakatinya perjanjian *Comfort Women Deal* tahun 2015 tersebut terhadap sentimen anti-Jepang yang ada di Korea Selatan.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, identifikasi masalah, maka perumusan masalah yang akan dibahas :

“ Apa pengaruh persetujuan *Comfort Woman Deal* Jepang – Korea Selatan tahun 2015 terhadap sentimen anti-Jepang di Korea Selatan ? ”

1.4 Pembatasan Masalah

Penulis akan melakukan pembatasan waktu penelitian yaitu tahun 2013 sampai tahun 2016, yaitu masa pemerintahan Park Geun-Hye. Pada tanggal 28 Desember 2015, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, dan Presiden Korea Selatan

Park-Geun Hye, menyepakati persetujuan *Comfort Women Deal* yang memuat persetujuan kompensasi dan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan *comfort women* disertai permintaan maaf yang disampaikan dalam pidato Shinzo Abe. Penulis melihat adakah pengaruh disepakatinya perjanjian *Comfort Women Deal* tersebut terhadap sentimen anti-Jepang di Korea Selatan. Penulis juga akan membahas aktor-aktor yang terlibat, yaitu Jepang dan Korea Selatan yang dipilih oleh penulis sebagai aktor-aktor penting karena keduanya merupakan negara yang menyepakati persetujuan *Comfort Women Deal* untuk memperbaiki hubungan kedua negara. Kedua negara tersebut letaknya berdekatan, memiliki sejarah kolonialisme yang sama, dan adanya sentimen anti-Jepang sebagai akibat dari sejarah kolonialisme Jepang memunculkan pertanyaan apa pengaruh upaya diplomasi Jepang terhadap sentimen anti Jepang di Korea Selatan.

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan apa pengaruh yang ditimbulkan dari disepakatinya perjanjian *Comfort Women Deal* tahun 2015 oleh Jepang dan Korea Selatan terhadap sentimen anti-Jepang di Korea Selatan.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini untuk menambah wawasan pembaca mengenai bagaimana pengaruh upaya diplomasi Jepang terhadap sentimen

anti-Jepang di Korea Selatan terhadap hubungan antara kedua negara. Penelitian ini juga berguna untuk menjadi bahan rujukan bagi penstudi hubungan internasional yang akan melakukan penelitian mengenai topik serupa.

1.6 Studi literatur

Peneliti mengambil tiga sumber berupa artikel dari jurnal dan buku dimana sumber-sumber tersebut membahas hubungan antara Jepang dengan Korea Selatan dan sentimen anti-Jepang. Sumber-sumber literatur ini juga membahas upaya permintaan maaf dan kompensasi Jepang atas kekejaman pada masa kolonialnya. Dalam salah satu sumber juga membahas tentang bagaimana pemahaman sejarah yang berbeda dapat mempengaruhi hubungan antar negara. Sumber literatur ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal sentimen anti-Jepang dalam hubungan antar Jepang dan Korea Selatan.

Dalam sebuah artikel jurnal yang berjudul *Historical Beliefs and the Perception of Threat in Northeast Asia: Colonialism, The Tributary System, and China–Japan–Korea Relations in the Twenty-First Century* yang ditulis oleh Peter Hays Gries, Qingmin Zhang, Yasuki Masui and Yong Wook Lee, menyatakan bahwa perbedaaan pandangan sejarah kerap kali menjadi kontroversi yang terus mewabah di ranah politik Asia Timur hingga saat ini. Beberapa contoh kasusnya antara lain Tiongkok dan Korea Selatan yang memprotes buku teks pelajaran sejarah Jepang; kunjungan politisi Jepang ke Kuil Yasukuni; dan protes Korea Selatan terhadap klaim bahwa Kerajaan *Goguryo* adalah kerajaan milik

Tiongkok.¹⁰ Berdasarkan survei di kalangan mahasiswa di Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, penelitian ini memamparkan hubungan antara keyakinan tentang sejarah, ancaman yang dirasakan pada saat ini, dan preferensi kebijakan luar negeri untuk masa yang akan datang dalam beberapa hasil survey.

Analisis dalam artikel jurnal ini lebih menekankan pada bagaimana pandangan masyarakat usia muda di Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan terhadap pemahaman sejarah negara masing-masing. Bagaimana pemahaman sejarah mempengaruhi tindakan atau kebijakan luar negeri yang akan dibuat kedepannya sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing digambarkan melalui data-data yang didapat melalui survey dikalangan mahasiswa universitas di Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Penelitian tersebut juga membahas tentang bagaimana persepsi yang berbeda-beda tentang sejarah dapat mempengaruhi hubungan antara negara-negara tersebut, sedangkan dalam penelitian oleh penulis akan dibahas bagaimana sentimen anti-Jepang yang telah terbentuk diatasi oleh upaya diplomasi Jepang berupa rekonsiliasi terhadap Korea Selatan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini melihat bagaimana persepsi masyarakat Korea Selatan terhadap Jepang dan bagaimana pengaruh upaya permintaan maaf Jepang terhadap persepsi negatif tersebut.

Dalam sebuah artikel jurnal yang berjudul *Comforting the Comfort Women: Who Can Make Japan Pay* yang ditulis oleh Sue R. Lee diceritakan bagaimana awal mula munculnya istilah *comfort women* atau sebutan bagi para

¹⁰ Peter Hays Gries, Qingmin Zhang, Yasuki Masui, dan Yong Wook Lee, "Historical Beliefs and the Perception of Threat in Northeast Asia", *International Relations of the Asia-Pacific* 9 (2009): hal. 245.

wanita yang dipekerjakan sebagai budak seks untuk para tentara Jepang. Pada tahun 1932 di Shanghai, untuk pertama kalinya Jepang membangun rumah pelacuran atau disebut juga *comfort station* yang kemudian diikuti pembangunannya di berbagai negara jajahan Jepang.¹¹ Setidaknya 200,000 wanita dikirim ke berbagai *comfort station* di berbagai negara jajahan Jepang, tidak hanya mendapatkan kekerasan seksual, wanita-wanita tersebut juga mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh tentara Jepang bahkan kematian. Selama bertahun-tahun Jepang berhasil menutupi kekejamannya terhadap *comfort women* dengan cara memusnahkan dokumen-dokumen bukti yang berisi tentang keterlibatan Jepang dalam pengoperasian *comfort station* tersebut.

Jepang akhirnya mau tidak mau mengakui keterlibatannya dalam merekrut wanita-wanita dari berbagai negara jajahannya, mendirikan, dan mengoperasikan *comfort station* setelah kemunculan dokumen-dokumen sebagai bukti yang tidak dapat dibantah. Pengakuan Jepang hanya disertai dengan kesediaan Jepang untuk menanggung tanggung jawab finansial tetapi tidak tanggung jawab moral terhadap korban-korban *comfort women* tersebut. Kasus *comfort women* ini akhirnya dibawa ke *District of Columbia ("D.C.") District Court* pada September tahun 2000, Jepang dituntut untuk mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab baik secara moral maupun legal; Jepang juga dituntut untuk menyampaikan permintaan maaf secara formal; penyingkapan semua fakta terkait sistem *comfort station*; serta revisi terhadap buku teks sejarah agar memuat tabiat Jepang pada masa Perang Dunia II.¹² Akan tetapi berkat bantuan pemerintahan Presiden Bush terhadap Jepang kasus ini diberhentikan, hal tersebut

¹¹ Sue R.Lee, Op.Cit., hal.509.

¹² Sue R.Lee, Op.Cit., hal.545.

juga memperlihatkan bagaimana *District Court* di Amerika Serikat kurang tepat untuk menjadi arena untuk penyelesaian masalah *comfort women* tersebut. Penelitian ini lebih berfokus pada sejarah perbudakan seks Jepang, bagaimana reaksi Jepang menghadapi tuntutan dari korban *comfort women*, serta bagaimana tuntutan isu *comfort women* tersebut diproses di *district court*.

Dalam sebuah artikel jurnal yang berjudul *Japan's Security Policy: from a Peace State to an International State* yang ditulis oleh Bhubhinder Singh berpendapat bahwa ada perubahan yang signifikan dalam kebijakan keamanan Jepang pasca-Perang Dingin dibandingkan dengan kebijakan keamanan pada saat Perang Dinginnya. Perubahan yang signifikan tersebut terjadi karena adanya pergeseran pandangan Jepang terhadap identitas keamanannya, perubahan tersebut dari "*peace state*" menjadi "*international state*".¹³ Perubahan tersebut mengartikan bahwa Jepang ingin berperan lebih aktif dalam urusan strategis militer pasca-Perang Dingin karena adanya pergeseran struktur normatif dalam praktik dan peran Jepang di lingkungan keamanan regional dan internasional. Identitas keamanan yang dimiliki *international state* semakin diakui oleh para pembuat kebijakan keamanan di Jepang dan digunakan untuk merumuskan kebijakan keamanan Jepang pada periode pasca-Perang Dingin.

Hal ini juga secara bertahap diterima oleh masyarakat luas dan telah menjadi fitur permanen dari wacana keamanan Jepang. Perubahan identitas keamanan Jepang menjadi *international state* adalah perubahan dalam kebijakan keamanan Jepang berupa gagasan kolektif tentang 'perdamaian' yang tetap kuat di

¹³ Bhubhinder Singh, "Japan's Security Policy: from a Peace State to an International State", *The Pacific Review* (2008): hal.303.

dalam negara dan masyarakat Jepang. Namun, sarana untuk mencapai 'perdamaian' melibatkan dimensi internasional yang lebih besar dalam kebijakan keamanan pasca-Perang Dingin Jepang.¹⁴ Hal ini memperlihatkan bagaimana identitas keamanan Jepang dan perannya di dalam sistem internasional berubah pasca-Perang Dingin dari negara non-militer menjadi negara internasional yang dapat berperan dalam strategi militer di sistem internasional.

Serta dalam sebuah buku yang ditulis oleh Jane W. Yamazaki yang berjudul *Japanese Apologies for World War II: the Rhetorical Study* dijelaskan bahwa ada tiga motivasi umum atau justifikasi dari permintaan maaf atas tindakan di masa lalu yang nyata dalam permintaan maaf negara Jepang: perbaikan hubungan; belajar dari sejarah atau refleksi diri; dan tanggung jawab moral. Buku ini juga mencatat adanya motivasi yang berbeda dari permintaan maaf Jepang yaitu protes dari publik yang mendesak Jepang untuk segera meminta maaf.¹⁵ Permintaan maaf Jepang kepada Korea Selatan menunjukkan adanya keinginan dari pihak Jepang untuk memperbaiki hubungan bilateral, serta untuk kembali membangun hubungan kepercayaan antar kedua negara. Pemerintah Jepang dan Korea melihat permintaan maaf dan kompensasi oleh Jepang tersebut sebagai kunci dari upaya rekonsiliasi.

Motif untuk permintaan maaf juga karena ada keinginan untuk belajar dari masa lalu, dengan berbuat demikian menciptakan identitas dan citra yang baru. Jadi permintaan maaf adalah sebuah mekanisme untuk mengklaim identitas moral baru dan arah baru bagi hubungan Jepang dan Korea Selatan di masa yang akan

¹⁴ Ibid, hal.319.

¹⁵ Jane Yamazaki, Op.Cit., hal.128.

datang. Permintaan maaf Jepang terhadap *comfort women* adalah contoh dari permintaan maaf yang bersifat transenden dan juga menggambarkan penggunaan permintaan maaf untuk membangun standar moral yang baru.¹⁶ Melalui permintaan maaf Jepang hubungan dengan Korea Selatan dapat mulai membaik dan dimulai dengan awal yang baru.

1.7 Kerangka Pemikiran

Hubungan internasional adalah studi tentang hubungan dan interaksi yang terjalin antar negara yang meliputi aktivitas-aktivitas kenegaraan, dan pembuatan kebijakan oleh pemerintah. Selain melibatkan aktor negara, aktivitas dalam hubungan internasional juga melibatkan interaksi antar aktor-aktor non-negara seperti organisasi internasional (OI), organisasi non-pemerintah (NGOs), dan perusahaan multinasional (MNCs).¹⁷ Negara sebagai aktor yang mempunyai kedaulatan memperjuangkan kepentingannya dengan berinteraksi dengan negara lain, interaksi tersebut kemudian menghasilkan hubungan saling ketergantungan karena adanya perbedaan kepentingan antar negara. Hubungan antar aktor-aktor negara dengan negara maupun non-negara membentuk suatu sistem internasional dimana aktor-aktor tersebut harus menemukan cara untuk hidup berdampingan.

Aktor-aktor hubungan internasional di dalam sistem internasional berinteraksi lewat kebijakan-kebijakan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan bentuk dari politik luar negeri dari

¹⁶ Ibid.

¹⁷ George Sorensen dan Robert Jackson, *Introduction to International Relation* (Oxford University, 2013): hal.4

sebuah negara yang dibuat demi kepentingan negara tersebut. Politik luar negeri merupakan hal-hal yang dikemukakan berupa tujuan, komitmen dan atau pengarahan yang eksplisit, dan dilakukan oleh perwakilan pemerintah. Kegiatan dalam politik luar negeri diarahkan pada tujuan, kondisi dan aktor, baik pemerintah maupun non-pemerintah, serta mencakup area yang berada di luar legitimasi teritorialnya.¹⁸

Konsep diplomasi menjelaskan tentang seni berkomunikasi dan bernegosiasi sebuah negara melalui wakilnya yang dilakukan untuk mempertahankan dan mendapatkan kepentingan nasionalnya. Diplomasi dalam hubungan internasional adalah kegiatan-kegiatan yang berupa negosiasi, menjalin hubungan baik dengan negara lain, kerjasama, dan bersepakat dalam sebuah perjanjian.¹⁹ Dalam usaha untuk mempertahankan dan mendapatkan kepentingannya, seorang aktor dalam diplomasi harus memperhatikan apa saja yang menjadi kepentingan bersama serta mengambil keputusan yang dapat menguntungkan semua pihak agar kesepakatan dapat dicapai. Beberapa fungsi dari diplomasi antara lain adalah untuk mempertahankan situasi damai dan meningkatkan hubungan baik antara satu negara dengan negara lainnya, sehingga jika terjadi selisih paham atau pun konflik dapat diselesaikan dengan cara negosiasi terlebih dahulu.²⁰

Dalam berdiplomasi sebuah negara terlebih dahulu menganalisis apa saja yang menjadi kepentingannya (*interests*), ancaman (*threat*), kesempatan (*opportunity*), dan hambatan-hambatan (*obstacle*) yang dapat menghalangi

¹⁸ Fredrik Bynander dan Stefano Guzzini, *Rethinking Foreign Policy* (Routledge, 2013), hal.181.

¹⁹ G. R. Berridge, *Diplomatic Theory from Machievelli to Kissinger* (New York: Palgrave, 2001): hal.3.

²⁰ Ibid, hal. 194.

kerjasama dengan negara tersebut. Dengan modal kepentingan dan ancaman yang menjadi keprihatinan bersama, kemungkinan bagi negara tersebut untuk mau membangun suatu hubungan baik dan hubungan kerjasama juga semakin besar. Aspek hambatan (*obstacle*) dalam bahasan ini adalah isu sentimen anti-Jepang yang diantaranya terkait isu *comfort women* yang dinilai belum terselesaikan secara tuntas. Untuk dapat memperbaiki hubungan antara Jepang dan Korea Selatan, Presiden Park Geun-Hye menuntut Perdana Menteri Shinzo Abe untuk terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan *comfort women* beserta isu-isu lain yang memicu sentimen anti-Jepang di Korea Selatan.

Hubungan Jepang dan Korea Selatan telah sering kali mengalami pasang-surut, perbedaan ingatan atau kenangan (*remembrance*) terhadap sejarah masa kolonial Jepang di Korea Selatan menjadi salah satu faktor terbentuknya sentimen anti-Jepang. Ingatan atau pemahaman sejarah yang berbeda antara kedua negara tersebut memunculkan sentimen berupa kebencian yang berlarut-larut selama bertahun-tahun lamanya yang berdampak buruk terhadap hubungan Jepang dan Korea Selatan. Sejarah masa lalu yang kelam merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Korea Selatan mempresepsikan Jepang sebagai ancaman, persepsi ancaman tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan Korea Selatan terhadap Jepang. Penyangkalan (*denial*) Jepang terhadap kekejamannya di masa lalu juga memicu ketegangan dan kritik dari negara-negara bekas jajahannya, sehingga tidak adanya penyesalan (*contrition*) dilihat sebagai ancaman bagi negara-negara tersebut.

Ingatan (*remembrance*) merupakan faktor penunjang keberhasilan dari upaya rekonsiliasi, ingatan yang bersifat penyesalan (*apologetic remembrance*)

dilakukan dengan tidak menyangkal kesalahan yang pernah dilakukan; dan menerima sepenuhnya pertanggungjawaban atas kesalahan tersebut.²¹ Dengan memenuhi kriteria *apologetic remembrance* tersebut, upaya rekonsiliasi kemungkinan besar dapat berjalan dan mengurangi persepsi ancaman dari negara lain sekaligus meningkatkan rasa kepercayaan (*trust*). Contoh keberhasilan Jerman dalam upaya rekonsiliasinya dengan Perancis menunjukkan bahwa rekonsiliasi setelah adanya masa lalu yang kelam sekalipun masih mungkin terjadi.²²

Ingatan kolektif (*collective memory*) menurut Halbwachs adalah ingatan sosial yang dimiliki atau diyakini oleh suatu masyarakat yang berasal dari representasi masa lalu yang sama.²³ Ingatan kolektif yang dimiliki oleh masyarakat tersebut berhubungan erat dengan sejarah yang pernah terjadi, dalam hal ini ingatan kolektif suatu negara dapat mempengaruhi hubungan dan tingkah laku negara tersebut terhadap negara yang lain.²⁴ Pemahaman sejarah yang berbeda antara Jepang dan Korea Selatan dapat disebabkan oleh pendidikan dan pencitraan yang berbeda terhadap apa yang terjadi di masa lalu. Karakteristik dari ingatan kolektif adalah daya tahan ingatan tersebut dalam masyarakat, sejarah tersebut bisa saja terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu tetapi ingatan kelam akan sejarah tersebut masih akan bertahan di masa yang akan datang.

²¹ Jennifer Lind, *Sorry States: Apologies in International Politics* (New York : Cornell University, 2008), hal. 4.

²² Ibid, hal.3.

²³ Maurice Halbwachs, dan Lewis A. Coser, *On Collective Memory* (Chicago: University of Chicago Press, 1992), hal.224.

²⁴ Choi Eun-Mi, "Memory Politics and International Relations in East Asia – Focusing on Past Problem between South Korea and Japan", *International Area Studies Review* 13 (2), hal. 69.

Memori kolektif yang dimiliki suatu masyarakat dapat berbeda dengan masyarakat di daerah atau negara lain, faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain pendidikan sejarah yang berbeda dan ingatan yang telah lama ada dan diyakini masyarakat negara tersebut. Perbedaan memori kolektif masyarakat Korea Selatan dengan masyarakat Jepang sebagai contoh terlihat dari isi buku teks pelajaran sejarah Jepang yang menjadi pertentangan karena tidak sesuai dengan sejarah menurut sudut pandang sejarah Korea Selatan. Daya tahan dari memori kolektif yang ada di masyarakat dapat mempengaruhi perilaku suatu negara dan sikap pengambilan keputusannya.²⁵ Meskipun masa penjajahan Korea Selatan oleh Jepang telah lama berakhir tetapi masyarakat Korea Selatan masih mengingat dan memperjuangkan kekejaman Jepang pada masa itu, contohnya antara lain gerakan membela *comfort women*.

Mencontoh upaya permintaan maaf yang dilakukan Jerman terhadap peristiwa *holocaust*, Chancellor Konrad Adenauer dan tokoh-tokoh pemimpin di Jerman Barat mengakui segala bentuk kesalahan dan tidak sedikit pun menyangkal tindakan yang telah dilakukan Jerman. Adenauer juga memberikan kompensasi kepada Israel dan membuat kebijakan beserta pernyataan penyesalan atas kejahatan yang tidak terbantahkan atas kaum Yahudi pada masa itu.²⁶ Upaya permintaan maaf yang disebut dengan *Model Adenauer* ini berdampak baik bagi Jerman dan upaya memperbaiki hubungannya dengan negara-negara yang pernah mempresepsikan Jerman sebagai ancaman. Upaya permintaan Jepang yang mirip dengan upaya permintaan maaf Jerman dapat dianalisa dengan *Adenauer Model*, sehingga dapat dianalisa juga pengaruh upaya diplomasi Jepang terhadap

²⁵ Ibid.

²⁶ Alisa Gaunder, *Routledge Handbook of Japanese Politics* (London: Routledge, 2016): hal.316.

sentimen anti-Jepang di Korea Selatan. Dalam penelitian ini pengaruh dari perjanjian *Comfort Women Deal* tahun 2015 akan diukur menggunakan opini publik dan pernyataan resmi (*official statement*) dari pemimpin-pemimpin negara seperti yang ditulis oleh Jennifer Lind dalam konsep rekonsiliasinya. Demikian konsep-konsep di atas akan digunakan untuk membahas tentang isu yang telah disampaikan sebelumnya.

1.8 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.8.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan metode pengumpulan data dan analisis. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dimana peneliti akan mendeskripsikan pengaruh perjanjian *Comfort Women Deal* 2015 terhadap sentimen anti-Jepang di Korea Selatan.

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan bacaan seperti buku teks, majalah, jurnal, surat kabar, dan artikel serta penelusuran sumber data dan info melalui situs resmi di internet.

1.9 Sistematika Penulisan

Penelitian yang berjudul “Pengaruh *Comfort Women Deal* 2015 Terhadap Sentimen Anti-Jepang di Korea Selatan” akan disusun ke dalam lima bab. Bab I akan disusun latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, studi literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian dan teknik pengumpulan data. Bab II dibahas mengenai sentimen anti-Jepang & diplomasi Jepang terhadap sentimen anti-Jepang. Selanjutnya pada Bab III dibahas mengenai hubungan bilateral Jepang – Korea Selatan. Pada Bab IV dibahas mengenai pengaruh persetujuan *Comfort Women Deal* tahun 2015 terhadap hubungan Jepang-Korea Selatan, serta pada Bab terakhir dalam penelitian ini adalah Bab V yang berisikan kesimpulan dari penelitian.